Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi V
Minggu ke-2 Januari
(5 s.d. 11 Januari 2026)
2026

BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging research to parliament
Evidence based policy making

PENGUATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI PENDUKUNG SEKTOR PARIWISATA

Fitria Melinda
Analis Legislatif Ahli Pertama
fitria.melinda@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Insiden kecelakaan transportasi di kawasan pariwisata kembali terjadi pada akhir Desember 2025, salah satunya melibatkan moda transportasi laut. Kapal wisata KM Putri Sakinah dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Padar, Manggarai Barat, pada 26 Desember 2025. Kapal tersebut membawa 11 orang yang terdiri dari 6 wisatawan mancanegara asal Spanyol, 1 pemandu wisata, dan 4 awak kapal. Operasi pencarian dan penyelamatan yang berlangsung selama 15 hari secara resmi telah dihentikan pada 9 Januari 2026. Dari total penumpang dan awak kapal, 7 orang berhasil diselamatkan, 3 orang ditemukan meninggal dunia, dan 1 orang dinyatakan hilang. Proses pencarian melibatkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, TNI, Polri, serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), dengan dukungan teknologi pencarian, seperti *multibeam* sonar dan *remotely operated vehicle*.

Kepala Kantor KSOP Kelas III Labuan Bajo, Stephanus Risdiyanto, menyatakan bahwa KM Putri Sakinah diberangkatkan dalam kondisi laik laut dan telah memenuhi seluruh persyaratan dokumen pelayaran yang masih berlaku. Selain itu, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi tinggi gelombang pada hari keberangkatan masih berada dalam batas aman. Namun demikian, laporan awal mengindikasikan kecelakaan dipicu oleh anomali kondisi gelombang laut yang meningkat secara tiba-tiba hingga melebihi dua meter, sehingga menyebabkan kapal terbalik dan tenggelam. Peristiwa ini menunjukkan bahwa faktor keselamatan transportasi tidak semata-mata ditentukan oleh kelaiklautan teknis dan kelengkapan dokumen administratif, tetapi juga kesiapan sistem keselamatan dalam merespons situasi darurat dan dinamika lingkungan ekstrem di lapangan.

Selain moda laut, kecelakaan juga terjadi pada moda transportasi darat. Pada 22 Desember 2025, bus milik PT Cahaya Wisata Transportasi mengalami kecelakaan tunggal dengan kondisi terguling di simpang susun *Exit* Tol Krapyak, Semarang, saat melayani rute Jakarta–Yogyakarta. Kecelakaan terjadi ketika bus melintasi ruas jalan menurun dan menikung, sehingga diduga pengemudi kehilangan kendali atas kendaraan. Insiden ini mengakibatkan 16 orang meninggal dunia serta sejumlah penumpang lainnya mengalami luka-luka.

Berbeda dengan insiden pada transportasi laut, hasil pemeriksaan atas kecelakaan ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap standar keselamatan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa berdasarkan *ramp check* yang dilakukan pada 9 Desember 2025, bus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan laik jalan sehingga tidak seharusnya dioperasikan. Selain itu, kendaraan tersebut juga tidak terdaftar sebagai angkutan pariwisata maupun angkutan antarkota antarprovinsi dalam sistem MitraDarat. Kondisi ini mencerminkan adanya kelalaian pelaku usaha jasa transportasi terhadap standar teknis dan administratif angkutan pariwisata. Sebagai tindak lanjut, Kemenhub menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin operasional perusahaan selama 12 bulan, guna mendorong perbaikan sistem manajemen keselamatan angkutan.

Peristiwa kecelakaan ini berpotensi menurunkan kepercayaan wisatawan terhadap aspek keselamatan transportasi di kawasan pariwisata. Insiden tenggelamnya kapal wisata tersebut menunjukkan bahwa kelaiklautan teknis dan kelengkapan dokumen pelayaran belum sepenuhnya menjamin keselamatan operasional di lapangan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan sistem keselamatan dalam mengantisipasi risiko tak terduga, seperti perubahan cuaca dan gangguan stabilitas kapal, termasuk yang berpotensi timbul akibat modifikasi atau penambahan muatan. Oleh karena itu, peningkatan kesiapan sumber daya manusia melalui pelatihan keselamatan, simulasi keadaan darurat, serta penguatan tim tanggap darurat secara berkala menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemampuan awak kapal untuk merespons insiden secara efektif. Pada sisi lain, kecelakaan angkutan darat memperlihatkan masih lemahnya pengawasan terhadap kelaikan kendaraan dan kesiapan pengemudi. Selain faktor kendaraan dan pengemudi, aspek prasarana jalan merupakan salah satu aspek yang perlu dievaluasi secara berkala, termasuk kesesuaian rambu peringatan dengan karakteristik ruas jalan yang dilalui angkutan pariwisata.

Atensi DPR

Kecelakaan transportasi di kawasan pariwisata pada Desember 2025 menunjukkan pentingnya penguatan keselamatan transportasi sebagai elemen strategis dalam mendukung keberlanjutan sektor pariwisata nasional. Kondisi ini memerlukan peran aktif Komisi V DPR RI untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan keselamatan transportasi pariwisata, termasuk kepatuhan terhadap uji kelaikan kendaraan, validasi perizinan angkutan pariwisata, penegakan sanksi, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, Komisi V DPR RI juga perlu mendorong Kemenhub untuk melakukan penguatan pengawasan keselamatan berbasis risiko yang didukung oleh data terintegrasi, termasuk pembinaan dan peningkatan akuntabilitas pelaku usaha, penguatan kapasitas pengawasan di daerah, serta pengendalian risiko pada periode lonjakan kunjungan wisata. Selain aspek teknis, pengawasan keselamatan perlu mencakup peningkatan kompetensi awak dan pengemudi, kesiapan sistem keselamatan operasional dalam merespons kondisi darurat, serta penguatan koordinasi dengan BMKG dalam pemanfaatan informasi cuaca. Penguatan sistem keselamatan yang dilakukan secara konsisten diharapkan dapat menjaga kepercayaan wisatawan, memperkuat citra destinasi, serta mendukung kebijakan pengembangan pariwisata nasional.

Sumber

antaranews.com, 6 dan 8 Januari 2026;
detik.com, 7 Januari 2026;
Kompas, 6 Januari 2026;
kompas.com, 6 Januari 2026;
mediaindonesia.com, 5 Januari 2026; dan
tempo.co, 6 Januari 2026.

IsuSepekan

Koordinator Anih Sri Suryani
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR
Polhukam Prayudi, Ahmad Budiman, Novianti, Rachmi Suprihartanti S.
Ekkuinbang Sony Hendra P., Rafika Sari, Rasbin, Venti Eka Satya, Hilma Meilani, Niken Paramita P.
Kesra Yulia Indahri, Trias Palupi K., Nur Sholikah P. S.

LAYOUTER
Devindra R. Oktaviano, Ully Ngesti Pratiwi, Desty Bulandari, Yustina Sari, Rahmat Sawalman, Fitria Melinda, Muhammad Zakik A., Fadila Puti Lenggo G., Yiyis Aldi Mebra, Anugrah Juwita S., Timothy Joseph S. G., Eva Mutia Ghofarany, Farhan Ryandi

https://pusaka.dpr.go.id @pusaka_bkdprri
©PusakaBK2026
Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making